

SKRIPSI

**ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DALAM RUANG
MEDIA SOSIAL TERHADAP PENANGANAN COVID-19**

DI KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

SITI NURHALIZA FEBRYNA KHAIDIR

Nomor Stambuk : 105641110518



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DALAM RUANG
MEDIA SOSIAL TERHADAP PENANGANAN COVID-19**

DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh

SITI NURHALIZA FEBRYNA KHAYDIR

Nomor Stambuk : 105641110518

Kepada

31/05/2022

Prof.
Suh. Alim

P/0052/1PM/2200
KHA
e1

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar

Judul Proposal Penelitian : Siti Nurhaliza Febryna Khaidir

Nomor Stambuk : 105641110518

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

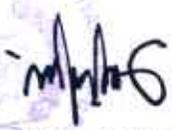

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM : 730 727

NBM : 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 035/FSP/A.4-II/V/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 12 Mei 2022.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)

2. Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

3. Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Nurhaliza Febryna Khaidir

Nomor Stambuk : 105641110518

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 22 Februari 2022

Yang menyatakan



Siti Nurhaliza Febryna Khaidir

ABSTRAK

Siti Nurhaliza Febryna Khaidir, Ihyani Malik dan Muhammad Randhy Akbar. Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Etika Komunikasi dalam penyampaian informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi pemerintah terkait dengan solusi dan upaya penanganan covid-19 di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana prinsip etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan kunci dari penyelenggara pemilu di Indonesia dengan teknik analisis data menggunakan software Nvivo 12 plus.

Hasil penelitian terkait Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar, penulis menggunakan prinsip Etika Komunikasi yang terdiri dari Prinsip Keindahan, Prinsip Persamaan, Prinsip Kebaikan, Prinsip Keadilan, Prinsip Kebebasan, dan Prinsip Kebenaran dengan kesimpulan sebagai berikut : (1) Prinsip Keindahan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah diterapkan pada penyampaian informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tetapi masih ada masyarakat yang belum puas terhadap penerapannya. (2) Prinsip Persamaan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah diterapkan pada penyampaian informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tetapi masih ada masyarakat yang belum puas terhadap penerapannya. (3) Prinsip Kebaikan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah diterapkan pada penyampaian informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar. Penerapan prinsip kebaikan ini merupakan prinsip yang paling utama digunakan pemerintah, walaupun menjadi prinsip yang paling utama digunakan, masih ada masyarakat yang belum puas pada penerapan prinsip tersebut. (4) Prinsip Keadilan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah diterapkan pada penyampaian informasi terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tetapi masih ada masyarakat yang belum puas terhadap penerapannya. (5) Prinsip Kebebasan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto pada dasarnya sering menggunakan prinsip ini, pemerintah memiliki hak untuk bebas melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah. Tetapi masih ada masyarakat yang belum puas terhadap penerapannya. (6) Prinsip Kebenaran, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah menerapkan prinsip ini, pemerintah menyampaikan informasi publik dengan data melalui kordinasi dengan berbagai pihak. Tetapi masih ada masyarakat yang belum puas terhadap penerapannya.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, Pemerintah, Media Sosial

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua yang sangat berjasa dan senantiasa mendoakan dan memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moral ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak M. Amin Umar, S.Ag., MPd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang

senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga proposal ini dapat di selesaikan.

6. Ibu Dr.Nuryanti Mustari S.IP.,M. Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

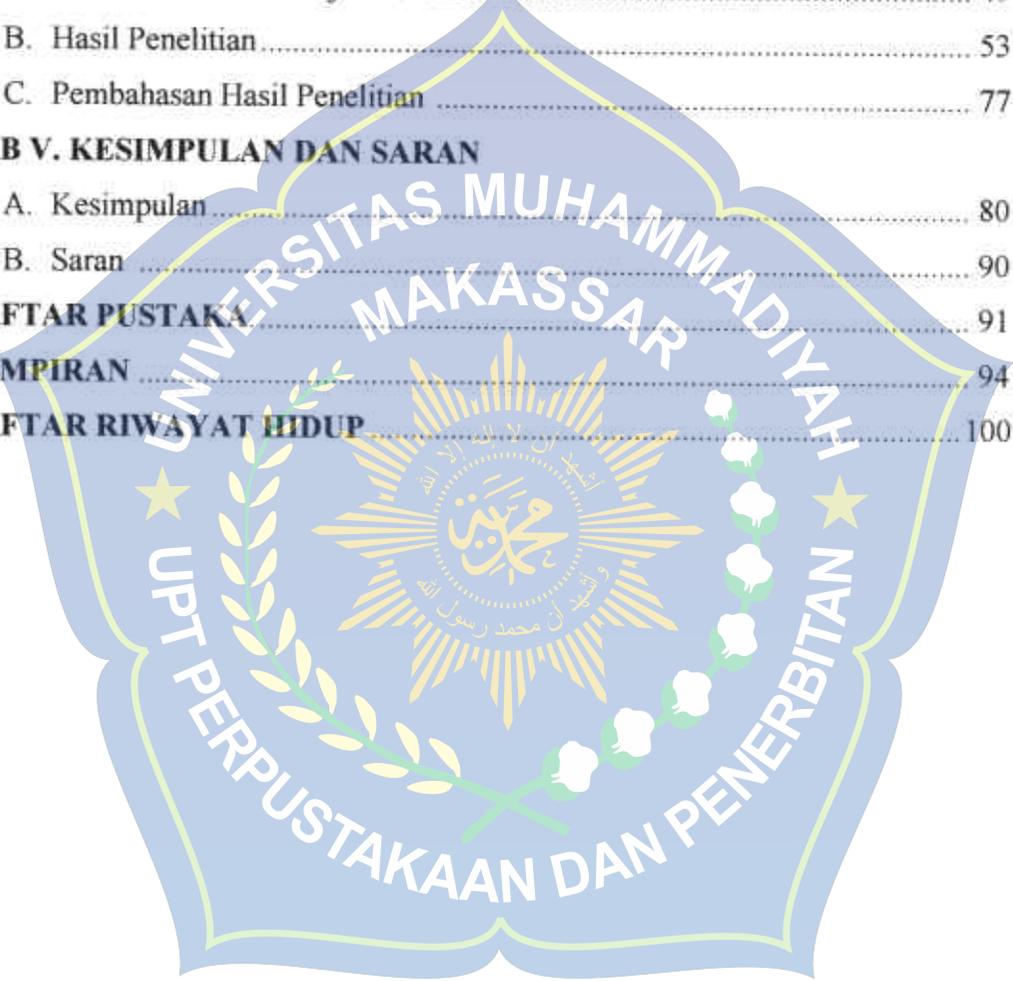
Makassar, 22 Februari 2021

Siti Nurhaliza Febryna Khaidir

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Manfaat Penulisan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Tinjauan Teori/Konsep	9
1. Konsep Etika	9
2. Konsep Komunikasi	13
3. Konsep Pemerintah, Media Sosial, dan Penanganan Covid-19	28
C. Kerangka Pikir	37
D. Fokus Penelitian	38
E. Deskripsi Fokus Penelitian	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42

F. Teknik Analisa Data	44
G. Keabsahan Data	47
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
Tabel 2.2 Informan Penelitian.....	42



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Etika Komunikasi	53
Grafik 4.2 Prinsip Keindahan	59
Grafik 4.3 Prinsip Persamaan	62
Grafik 4.4 Prinsip Kebaikan	64
Grafik 4.5 Prinsip Keadilan	66
Grafik 4.6 Prinsip Kebebasan	68
Grafik 4.7 Prinsip Kebenaran	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 2.2 Peta Kota Wilayah Makassar.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi atau wabah penyakit global COVID-19 telah menjadi peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi perhatian dunia sejak awal tahun 2020. COVID-19 awalnya muncul dari daerah Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Penyebaran luas COVID-19 menuntut respon kesiapan berbagai negara untuk dapat menanggulangi wabah ini. Pada waktu itu, pemerintah Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Walikota Makassar terkait pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 pada tanggal 17 Maret 2020 untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID-19 di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar membuat portal website www.infocorona.makassar.go.id sebagai sumber informasi resmi penanganan virus COVID-19 di Kota Makassar, tidak hanya melalui website, pemerintah Kota Makassar juga memberikan informasi penanganan virus COVID-19 di Kota Makassar dengan memanfaatkan media sosial instagramnya. Instagram adalah media yang terpopuler dan paling banyak diketahui oleh masyarakat. Instagram termasuk media sosial yang terbilang interaktif terlebih untuk digunakan pemerintah untuk melakukan Open Government Indonesia (OGI) dengan keterbukaan data

dan akses informasi yang luas terkait penanganan covid-19 yang sedang dihadapi Indonesia. Sebagai bentuk dari keterbukaan informasi tersebut lahirlah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan gebrakan pemerintah sebagai komitmen untuk melindungi dan menjamin hak publik atas berbagai informasi publik. Adanya undang-undang tersebut memosisikan pemerintah untuk memenuhi hak publik atas informasi publik.

Selain itu pemerintah juga dapat mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung serta dapat menjalin hubungan dengan masyarakat untuk saling mendukung dalam menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Melalui Instagram masyarakat dan pemerintah dapat saling memberi merespon melalui kolom komentar maupun secara pribadi melalui fitur Direct Messagem (DM). Instagram merupakan salah satu platform paling populer. Di Indonesia sendiri, pengguna aktifnya mencapai 63 juta pengguna dan menjadi pengguna aktif terbanyak ke-4 di dunia (Hootsuite We Are Social, 2020).

Pada masa pandemi ini, akun instagram @dpramdhanpomanto ini menjadi salah satu pusat informasi mengenai penanganan Covid-19 di Kota Makassar, dan memiliki 62.6 ribu followers. Akun Instagram @dpramdhanpomanto aktif mengunggah informasi seputar Covid-19, apalagi pemerintah memegang peran besar di tengah pandemi sebagai pembuat kebijakan untuk mengurangi risiko penularan yang terjadi agar masyarakatnya tetap hidup sehat. Berdasarkan postingan terkait dengan

informasi penanganan covid-19 di Kota Makassar pada akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat sentiment publik melalui kolom komentar. Sentiment publik tersebut dibagi menjadi sentiment negatif dan positif. Pada setiap postingan terkait dengan penanganan covid-19 ada beberapa komentar publik yang mendukung beberapa program pemerintah sebagai cara-cara untuk menangani covid-19 dan adapula yang menolak program pemerintah tersebut. Contohnya pada program makassar recover sebagai program penanganan covid-19 di Kota Makassar, beberapa masyarakat mendukung program tersebut dengan memberikan komentar positif berupa pujian, tetapi juga banyak sentiment negatif dari masyarakat. Misalnya, banyak masyarakat yang menuliskan komentar tentang program pemerintah tersebut yang dianggap tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran. (sumber: Instagram @dpramdhanpomanto, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana prinsip etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial untuk menangani covid-19 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah khususnya pada etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan untuk penerapan etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur untuk sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul “Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar”, menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ulfa, K. S (2020)	Etika Komunikasi Pemerintah di Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 Perspektif Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah dilakukan secara cepat serta efisien sehingga publik dapat mengetahui	Memiliki subjek penelitian yang sama yakni Etika Komunikasi Pemerintah	Penelitian ini berfokus pada perspektif Islam terhadap penanganan Covid-19, sedangkan yang diteliti

		<p>tindakan apa yang harus dilakukan terkait penanganan Covid-19. Informasi dipublikasikan secara transparan (terbuka), data tersebut murni niat idealis pemerintah dalam menangani Covid-19 tanpa adanya niat pragmatis dalam artian pemerintah mempunyai niat terselubung yang beresensi menguntungkan pihak pemerintah sendiri. Informasi</p>	<p>penulis adalah fokus pada etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19.</p>
--	--	--	--

		<p>dipublikasikan secara konsisten antara pemerintah satu dengan yang lain.</p>		
<p>Rengkung Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2021)</p>	<p>Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado Dalam Penanganan COVID-19.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dari aspek keterbukaan tantangannya adalah sulit meyakinkan masyarakat, pemerintah telah menggunakan berbagai media bahkan media komunikasi baru, masyarakat dijangkau secara</p>	<p>Memiliki subjek penelitian yang sama yakni Komunikasi Publik Pemerintah terkait penanganan Covid-19</p>	<p>Penelitian ini tidak berfokus dalam ruang media sosial, sedangkan, yang diteliti penulis adalah fokus pada komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial.</p>

		<p>langsung melalui kerjasama komunikasi dengan berbagai pihak termasuk tokoh-tokoh masyarakat, koordinasi lintas departemen pemerintah selain dilakukan secara langsung juga memanfaatkan media <i>whatsappgroup</i></p>		
<p>Karunianingsih, D. A., & Utomo, A. S (2020)</p>	<p>Etika Komunikasi Publik Bagi Humas Pemerintah Dalam Bermedia Sosial (Studi Kasus</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa pemilihan kata, bahasa, kalimat, dan tanda baca memiliki</p>	<p>Memiliki subjek penelitian yang sama yakni Etika Komunikasi Publik Pemerintah</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada akun media sosial dinas / lembaga tertentu sedangkan</p>

Pada Akun Twitter @ Kemkominfo Dan @ Infobmkg)	relevansi kuat terhadap penerapan etika berkomunikasi humas pemerintah berdasar kode etik humas pemerintah, termasuk dalam berkomunikasi di media social.		yang diteliti penulis adalah fokus kepada seluruh cakupan dalam ruang media sosial.
---	--	--	--

B. Tinjauan Teori/Konsep

1. Konsep Etika Komunikasi

a. Definisi Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika berasal dari kata *ethikus* dan dalam bahasa Yunani disebut *ethicos* yang berarti kebiasaan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku

manusia. Etika adalah cabang aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai, yang menitikberatkan pada pencarian salah dan benar atau dalam pengertian lain tentang moral dan immoral.

Menurut Rosadi Ruslan (2008:31) etika merupakan studi tentang “benar atau salah” dalam tingkah laku atau perilaku manusia. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Menurut Burhanuddin Salam (2000:3) etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Sedangkan menurut Supriyadi Sastrosupono (2001:9) etika adalah pemikiran yang relatif obyektif dan rasional mengenai cara kita mengambil keputusan dalam situasi yang konkrit, yaitu moralitas.

Sedangkan etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mengandung arti:

- a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral.
- b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik atau buruknya perilaku manusia adalah sebagai berikut:

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha menepong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
- b. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilakusaya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibalikinya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :

- a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

b. Manfaat Etika

Beberapa manfaat etika menurut Qohar (2012), adalah sebagai berikut:

1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.
2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah.
3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.
4. Dapat menjembatani semua dimensi ataunnilai-nilai.

2. Konsep Komunikasi

a. Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communication*, dan bersumberkkata *communis* yang berarti sama di sini maksudnya adalah sama makna. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafied Cangara (2004), komunikasi berpangkal

pada perkataan Latin *communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara terminology, para ahli komunikasi memberi pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing.

Dani Vardiansyah (2008) mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli :

1. Janis & Kelly menyebutkan "Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak).
2. Berelson & Stainer "Komunikasi adalah suatu prose penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain lain :
3. Gode "Komunikasi adalah suatu proses yang mebuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih"

Melihat berbagai definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sangatlah beragam tergantung atas pendekatan yang digunakan dalam menelaah pengertian komunikasi itu sendiri. Walaupun demikian dari berbagai definisi yang diungkapkan para ahli diatas maka secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan baik verbal maupun non verbal yang mengandung arti atau makna

tertentu atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu.

b. Unsur-unsur komunikasi

Cangara (2009:20) mengatakan bahwa ilmu komunikasi hanya bisa dikatakan komunikasi jika mempunyai bagian pendukung yang membangunnya sebagai *body of knowledge*, yaitu: sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik dan lingkungan. Unsur ini juga disebut elemen atau komponen. Adapun unsur yang dimaksud tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi juga bisa dalam bentuk kelompok. Proses komunikasi berawal dari sumber atau pengirim pesan, yaitu dimana gagasan, ide, atau pikiran berasal yang kemudian akan disampaikan kepada pihak penerima pesan. Sumber yang dapat dipercaya akan dapat memperkuat nilai informasi yang disampaikan. Dengan demikian status, kehandalan dan keahlian sumber menambah bobot sumber dalam proses komunikasi. Sumber juga dapat disebut sebagai komunikator, yaitu pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu, sumber disebut sebagai *communicator*, *sender*, *encoder* ataupun *source*. Untuk mencapai proses komunikasi yang diinginkan, seorang sumber atau komunikator harus memiliki

kepercayaan (*Credibility*), daya tarik (*Attractive*) dan kekuatan (*Power*) yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepercayaan (*Credibility*) adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak (penerima).
- b. Daya tarik (*Attractive*) adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator selain kredibilitas. Faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya komunikasi.
- c. Kekuatan (*Power*) adalah kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ingin mempengaruhi orang lain. Kekuatan bisa diartikan sebagai kekuasaan dimana khalayak dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang memiliki kekuasaan.

2. Pesan

Yang dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan memiliki tema yang menjadi pengarah di dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Berdasarkan sifatnya pesan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Informatif : Bersifat memberikan keterangan-keterangan (fakta) kemudian komunikasi mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu pesan informative justru lebih berhasil daripada persuasive.
- b. Persuasif : Berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi perubahan ini atas kehendak sendiri (bukan dipaksakan).
- c. Koersif : Penyampaian pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan

3. Media

Yang dimaksud dengan media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarpribadi, media kelompok, dan media massa. Cukup banyak alat sebagai media untuk keperluan berkomunikasi, yang dikelompokkan kepada beberapa golongan.

- a. Media umum, seperti surat menyurat, telepon, facsimile, dan telegraf.
- b. Media massa, seperti media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, media elektronik yaitu televisi, radio, film, dan media internet. Sifat media ini mempunyai efek serempak dan cepat.
- c. Media khusus, seperti iklan, logo dan nama perusahaan, atau produk yang merupakan sarana atau media untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif.

d. Media internal, yaitu media yang dipergunakan untuk kepentingan kalangan terbatas dan nonkomersial serta lazim digunakan dalam aktivitas humas.

4. Penerima (Komunikan)

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk organisasi, instansi, departemen, partai dan Negara. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan. Dalam proses *trust and image* komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber.

5. Pengaruh

Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Pengaruh komunikasi berupa perubahan dalam opini, opini pribadi (*personal opinion*), opini publik (*public opinion*), opini mayoritas (*majority opinion*), sikap dan tingkah laku (*attitudes and behavior*), pandangan, persepsi dan ide (*conception, perception, idea*), kepercayaan dan citra.

6. Umpan balik

Tanggapan balik atau umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Tanggapan balik sangat penting karena boleh dikata semua komunikasi yang menginginkan keharmonisan memerlukan tanggapan balik. Sesuai dengan pemaparan tersebut, komunikasi dibentuk oleh adanya pengiriman pesan atau informasi melalui komunikator kepada

komunikasikan. Pada saat melakukan pertukaran informasi ini, media atau saluran yang digunakan dapat mempengaruhi penerima pesan dalam memberikan umpan balik atau *feedback*. Umpan balik merupakan efek yang diberikan setelah adanya pengiriman pesan antara komunikator kepada komunikan. Efek ini dapat berupa pemahaman sehingga adanya perubahan sikap, persepsi dan tingkah laku.

7. Lingkungan

Lingkungan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi dan dimensi waktu. Sesuai dengan pembahasan diatas, bahwa didalam suatu proses komunikasi terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen dalam komunikasi. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap efek pemahaman persamaan informasi yang menjadi tujuan berkomunikasi.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendi (2003:18) di dalam komunikasi, terdapat faktor pendukung, diantaranya:

- a. Kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya distorsi, yaitu pengalihan makna pesan yang pertama ke penerima selanjutnya.
- b. Adanya *Feedback* atau umpan balik. Hal ini akan dapat mempermudah proses komunikasi yang berlangsung karena mendapatkan respon yang cepat sehingga terjadi dialog yang matang

- c. Evaluasi pesan. Pada tahap ini seorang penerima dan pengirim pesan akan bersama-sama mengevaluasi dari hasil percakapan yang dilangsungkan. Oleh karena itu, jika evaluasi ini terjalin dengan sinkron maka akan menimbulkan kesamaan pemahaman dalam mengartikan pesan.
- d. Media pengantar, yaitu sebagai bagian dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Dengan media, komunikasi akan dapat efektif jika terdapat media pengantar seperti surat kabar, televisi, telepon dan lain-lain.

Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menimbulkan gangguan komunikasi sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai. Pada dasarnya, hambatan itu dapat terjadi karena adanya distorsi, yaitu pergeseran makna pesan yang dimunculkan oleh si penerima pesan.

Menurut David R. Hampton dalam Moekijat (2003:191), menggolongkan rintangan atau hambatan komunikasi menjadi :

- a. Hambatan pada sumber, dapat disebabkan pengirim menyampaikan pesannya dengan tidak jelas, sehingga penerima pesan ragu-ragu untuk menafsirkannya.
- b. Hambatan pada penerima, dapat disebabkan karena pesan melalui perantara sehingga pesan yang disampaikan pengertiannya mungkin akan berubah. Dapat disebabkan kurangnya perhatian atau penilaian sebelum waktunya, lebih banyak membeikan tanggapan atau perilaku yang tidak penting terhadap pokok pesannya.

- c. Hambatan dalam umpan balik, adanya komunikasi satu arah yang tidak memungkinkan adanya umpan balik dari penerima.

Sedangkan dalam Widjaja (2000:100) problem komunikasi biasanya merupakan suatu gejala bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Problem komunikasi menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. Hambatan komunikasi yaitu berasal dari pengirim (komunikator), transmisi, dan penerima.

Hambatan dalam komunikasi antara lain:

- a. Kurangnya perencanaan
- b. Pesan yang tidak jelas
- c. Adanya ancaman
- d. Penilaian atau evaluasi yang premature
- e. Transmisi yang kurang baik
- f. Tidak adanya kepercayaan, dan
- g. Distorsi atau kesalahan informasi

d. Komunikasi Pemerintah

Menurut Erliana Hasan (2005) "Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangkai mencapai tujuan bernegara". Maria Jose Canel dan Karen Sanders dalam *Government Communication : An Emerging in Political Communication Research* (2011:85-86) : " *Governemnt communication refers to the aims, role and practice of communication implemented by executive politicians and officials of public instutions in the service of a political rationale, and that are themselves constituted on the basis of the people's*

indirect or direct consent and are charged to enact their will. (Hal ini memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peram dan praktik dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik, dan yang sendirinya merupakan atas dasar persetujuan langsung atau tidak langsung rakyat dibebankan untuk memberlakukan mereka).

Menurut Stromback and Kioussis (2011) dalam Canel dan Sanders melalui *Introduction : Mapping the Fields of Government Communication* (2013 : 4). Mereka mendefinisikan komunikasi pemerintahan dalam kerangka *political public relations* : " *Political public relations is the management process by which an organization or individual actor for political purposes, through purposeful communication an action, seeks to influence and establish, build, and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission and achieve its goals.*" (Hubungan politik kemasyarakatan adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk tujuan politik, melalui komunikasi serta tindakan yang memiliki tujuan, untuk mempengaruhi dan untuk melepaskan, membangun, dan mengelola hubungan yang menguntungkan dan reputasi dengan masyarakat (publik) untuk mendukung misi dan mencapai tujuan yang dimiliki).

- Fungsi Komunikasi Pemerintahan

Berbagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada publik;

2. Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan;
3. Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab;
4. Memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara.

e. Komunikasi Publik

Komunikasi Publik memiliki definisi komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan khalayak banyak. Melalui komunikasi publik, biasanya sumber pesan atau komunikator memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan dalam melakukan komunikasi publik :

1. Melalui Komunikasi Publik, sumber pesan memiliki tujuan untuk menginformasikan pesan kepada khalayak banyak. Informasi disampaikan oleh komunikator kepada khalayak banyak berupa pesan positif maupun negatif.
2. Melalui komunikasi publik, komunikator memiliki tujuan untuk menghibur.
3. Melalui komunikasi publik, komunikator memiliki tujuan untuk melakukan persuasif atau memengaruhi seseorang. Dalam melakukan persuasif perlu diperhatikan sebelum melakukan komunikasi publik :
 - a. Menganalisis khalayak, sangat penting sekali bagi komunikator sebelum melakukan persuasive menganalisis siapa khalayaknya.
 - b. Kredibilitas juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam melakukan komunikasi persuasif.

- c. Penyampaian pesan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Sampaikan pesan sesuai dengan target *audience*. Tidak perlu menggunakan bahasa yang sulit dipahami atau tidak pernah didengar oleh penerima pesan. Pesan yang kurang jelas juga membuat penerima pesan tidak percaya dengan komunikator.

3. Konsep Etika Komunikasi

a. Prinsip Etika Komunikasi

Menurut Richard L. Johannesen (2019) berpendapat banyak orang beranggapan bahwa dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan etika komunikasi sebagai suatu nilai-nilai atau norma mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Dalam teori ini, memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) membantu manusia mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam hidup ini; dan (3) untuk menciptakan kebahagiaan. Terlepas setuju atau tidaknya dengan teori di atas, namun ada hal yang bisa kita sepakati bahwa etika berhubungan dengan moral, "sistem tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia". Penggunaan moral patut dipahami oleh semua orang, karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Etika komunikasi memiliki "paradoks tersendiri. Di lain pihak, hal ini dapat menjadi hal positif namun terkadang

sesuatu yang negatif dan cenderung merusak serta memperburuk keadaan juga dapat terjadi. Maka dari itu pentingnya suatu etika komunikasi mulai dari kita berkomunikasi antar sesama sampai pada saat kita berkomunikasi didalam organisasi.

Menurut Richard L. Johannasen (2019) terdapat prinsip-prinsip etika Komunikasi yang sering dipergunakan oleh orang yang tengah menjalin hubungan komunikasi. Adapun enam prinsip etika komunikasi yaitu:

1. Prinsip Keindahan

Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam segi berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya. Namun semua ini akan sia-sia apabila orang-orang berkomunikasi tidak menunjukkan suatu keindahan apa lagi tidak ada suatu etika komunikasi. Keindahan dalam berkomunikasi itu menunjukkan sifat-sifat keramah-tamahan, senyum, salam dan lain-lain.

2. Prinsip persamaan

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang

tidak diskriminatif atas dasar apa pun. Bila dalam berkomunikasi tidak ada etika komunikasi maka akan ada salah satu pihak dalam organisasi itu merasa direndahkan, maka komunikasi tidak akan berjalan efektif.

3. Prinsip kebaikan

Prinsip kebaikan ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, kasih sayang dan saling membantu orang lain.

4. Prinsip keadilan

Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain.

5. Prinsip kebebasan

Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap

kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain.

Untuk itu kebebasan bagi setiap individu dapat diartikan sebagai:

- (1) kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan;
- (2) kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut;
- (3) kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

6. Prinsip kebenaran

Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan, agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan orang lain. Tidak semua kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan.

Jadi, pemahaman yang berbeda mengenai nilai-nilai etika yang ada membuat setiap orang dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap setiap etika komunikasi. Dalam melaksanakan komunikasi dalam organisasi penggunaan etika haruslah berhati-hati karena bukanlah tidak mungkin pemahaman etika kita berbeda dengan orang lain. Kurangnya pemahaman antarsesama dapat memunculkan *miss communication* atau bahkan menimbulkan suatu permasalahan dalam organisasi dan berujung timbulnya berbagai macam prasangka dan salah paham. Dalam

berbagai perbedaan tersebut, kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Nilai-nilai yang membentuk etika harus kita pahami dengan benar karena sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak menggunakan nilai-nilai etika didalamnya, setiap bentuk komunikasi selalu menggunakan etika walaupun dalam kadarnya masing-masing sesuai konteks, tujuan dan situasi yang ada. Maka dari itu etika komunikasi itu sangatlah penting dalam suatu organisasi harus ada nilai-nilai atau norma mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan seseorang atau kelompok untuk menghargai lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya tanpa menyakiti hati orang lain.

3. Konsep Pemerintah, Media Sosial dan Penanganan Covid-19

a. Pemerintah

Organisasi publik (pemerintah) saat ini juga menghadapi dunia digital yang terus mengalami perkembangan pesat. Dunia digital ini terus mengalami perkembangan terutama di bidang teknologi dan informasi sehingga menuntut pemerintah untuk menyesuaikan tantangan di era revolusi industri ke 4 atau Era 4.0. Peran komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam era digital saat ini menjadi semakin strategis. Pemerintah didorong untuk melakukan berbagai inovasi terkait pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, apalagi dimasa pandemi ini demi memutus rantai penyebaran virus beberapa aktivitas dan interaksi dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Dalam hal penanganan covid-19

upaya pemerintah menekan laju penyebaran covid-19 juga disampaikan secara virtual melalui media sosial. Sebagai bagian paradigma baru komunikasi pemerintah, komunikator pemerintah kini berpartisipasi mewujudkan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan memberikan saluran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan kolaborasi khususnya dalam penanganan covid-19.

▪ Fungsi Pemerintah

World Bank dalam Budi Setiyono (2007) menyatakan fungsi dasar pemerintah memiliki tujuh macam jenis, yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur sosial ekonomi (*providing social-economic infrastructure*). Pemerintah menyediakan institusi-institusi dasar, peraturan, dan rencana yang diperlukan untuk dilaksanakannya kegiatan sistem sosial dan ekonomi modern.
2. Menyediakan barang dan jasa kolektif (*provision of collective goods and services*). Ada berbagai jenis barang dan jasa umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, namun sulit dipenuhi secara individual, misalnya ketertiban umum, pertahanan nasional, jalan, jembatan, sarana kesehatan, dan lainnya.
3. Menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat (*resolution and adjustment of conflict*). Pemerintah dari negara pada dasarnya didirikan untuk mencegah dan mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mencapai keadilan, ketertiban, dan stabilitas.

4. Menjaga iklim persaingan (*maintenance of competition*). Kompetisi tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produksi. Namun, pemerintah tetap perlu melakukan control agar kompetisi dapat berlangsung secara sehat.
5. Melindungi lingkungan hidup (*protection of naturan resources*). Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dari eksploitasi yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem dan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.
6. Menyediakan akses minimum bagi individu terhadap barang dan jasa (*provision for minimum acces by individual to the goods and services economy*). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat yang kurang beruntung (*vulnerable*) agar mereka dapat hidup meskipun pada tingkat yang minimal.
7. Menstabilkan ekonomi (*stabilization of the economy*). Peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi siklus ekonomi antara "booming" dan resensi agar tidak terlalu ekstrem melalui kebijakan fiskal dan moneter.

b. Media Sosial

Menurut Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial berperan aktif menjadi alternatif sebagai fasilitator online

yang menggunakan hubungan antar pengguna sekaligus ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenala (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerjasama (*co-operation*). Munculnya berbagai macam media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam berkomunikasi terhadap khalyak ramai.

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Gohar F. Khan dalam bukunya *Social Media for Government* menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (*multiplier effect*).

Perkembangan penggunaan media sosial berbasis internet sebagai media komunikasi sangat pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telephone seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas (*smarthphone*). Dengan munculnya istilah tersebut, telah banyak yang menyediakan berbagai macam fasilitas dalam berkomunikasi, mulai

dari sms, mms, chatting, email, browsing, serta fasilitas media sosial lainnya.

Media sosial digunakan oleh semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, muda maupun sampai yang tua. Media sosial juga dapat menyampaikan informasi dengan mudah dan cepat kesegala penjuru lapisan masyarakat tanpa harus memilih siapa dan dimana keberadaanya. Ketika era digital tiba, semua menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Pemerintah tak mampu membendung kebebasan berpendapat dan berekspresi dari warganya. Keunggulan utama media sosial dibandingkan dengan teknologi lainnya adalah hiperaktualitas dan interaktivitas.

Teknologi informasi menjadi semakin terjangkau sehingga hampir semua orang memilikinya. Dunia digital membuat semua media bisa disampaikan baik berupa suara, tulisan, simbol, tulisan, hingga video bisa diunggah untuk dibagikan kepada orang lain. Media ini dengan cepat dapat menyebarkan berita atau peristiwa untuk dikomentari, didiskusikan, ditindaklanjuti, atau disebarlan kembali melalui media lain seperti media cetak, radio, dan televisi. Media digital tidak mengenal batas wilayah, waktu, dan tempat. Orang tak lagi berinteraksi sosial dengan orang lain secara langsung tetapi melalui media gawai. Komunikasi dilakukan secara cepat dan masal berdasarkan faktor kesamaan pandangan hidup, hobi, strata sosial, hingga agama. Hingga lahirlah interaksi digital yang terkotak-kotak.

▪ **Karakteristik Media Sosial**

1. Jaringan (*network*)
2. Informasi (*information*)
3. Arsip (*archive*)
4. Interaksi (*interactivity*)
5. Simulasi (*simulation of society*)

c. **Etika Komunikasi dalam Ruang Media Sosial**

Media sosial merupakan media yang sangat efektif dan dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja tanpa ada batasan-batasan baik dari segi umur, gender bahkan strata sosial. Kebebasan tersebut bukan hanya pada individu yang menggunakan, tapi kebebasan juga berada pada bagaimana memanfaatkan atau menentukan konten-konten dari isi pesan informasi yang disampaikan oleh komunikator dan isi pesan yang diterima oleh komunikan. (Irhamdi, 2018)

Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri, seorang pengguna media sosial bisa mengakses dengan menggunakan jaringan internet tanpa biaya, bebas memodifikasi baik tulisan, gambar video grafis dan berbagai model konten lainnya, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Tidak hanya itu penyampaian informasi pada ruang publik dan pelaksanaan aktivitas di era media sosial ini juga memerlukan kehati-hatian.

Pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan informasi tentunya membawa pengaruh yang sifatnya positif maupun negative, tergantung dari penggunaannya. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai media alternatif dalam menyampaikan informasi lebih banyak membawa efek negatif dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat kita terlalu mudah percaya dengan hal-hal yang sifatnya provokatif dan gampang dibohongi.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi banyaknya hal kontradiktif yang terjadi dalam ruang media sosial perlu ada penerapan etika komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi di ruang media sosial, melihat bahwa sulitnya membendung kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial.

d. Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2020 di Indonesia, dan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya turut menjadi perhatian bagi berbagai kalangan termasuk masyarakat luas, terlepas dari perdebatan mengenai misteri Covid-19 yang masih belum terpecahkan. Mulai dari cara penularan, apakah vaksinnya, dan bagaimana cara penanganan yang efektif. Menyikapi hal tersebut, komunikasi melalui media sosial yang efektif dapat menjadikan salah satu bentuk proteksi dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan dini terhadap semakin menyebarnya virus Corona tersebut. (Akbar, 2021)

Penanganan Covid-19 dan peran komunikasi publik pemerintah melalui media sosial, menjadi dua hal yang menjadi dalam satu bagian penting sebagaimana teori Muhammad, bahwasanya komunikasi berperan dalam segala aspek kehidupan. Termasuk dalam hal menjalin interaksi yang berhubungan dengan masyarakat luas mengenai pemberitaan maupun informasi-informasi mengenai Pandemi Covid-19 ini. Sehingga, stakeholder terkait dalam menangani Covid-19 harus memberikan informasi-informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat luas. Bila komunikasi tersebut, dapat berjalan dengan lancar dan baik dalam suatu organisasi maka akan mempermudah arah dan tujuan penyampaian informasi untuk publik atau masyarakat yang lebih luas.

Dalam melakukan upaya preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19, gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 menggunakan sarana media komunikasi elektronik dan online. Media komunikasi, baik elektronik maupun online, dinilai efektif dalam memberikan peringatan dan edukasi dini terkait peta penyebaran penyakit. Meskipun demikian, potensi hambatan yang akan muncul telah disadari oleh tim gugus percepatan dan penanganan COVID-19 agar tidak terjadi. Potensi ancaman yang dimunculkan akan menyebabkan kesalahan dalam memahami pesan dan kerentanan terhadap pesan bohong (hoax) yang menyebar tanpa terkendali. Kewaspadaan terhadap ancaman ini, menjadikan penyampaian pesan yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19. (Akbar, 2021)

Fungsi media sosial sebagai bagian dari konstruksi sosial mendapatkan urgensitasnya. Proses perubahan ini diawali dengan proses tindakan dan interaksi, yang memaksa individu untuk terus-menerus menjalankan pesan yang telah diterima sebagai sebuah tindakan. Media yang menjadi sarana dalam penyampaian pesan dalam menghadapi COVID-19, mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih adaptif dengan tuntutan sosial era pandemi. Dengan adanya proses penanaman pengetahuan melalui media sosial mempengaruhi proses eksternalisasi masyarakat mengenai pengetahuan dini mengenai COVID-19.

Beragam jenis media yang dapat digunakan dan mudah dijangkau oleh banyak kalangan memberikan signifikansi lain dari peran media yang banyak disebutkan oleh banyak akademisi. Peran media sosial ataupun komunikasi publik melalui media sosial diperlukan sebagai salah satu langkah efektif dalam penyelesaian akibat dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dengan adanya komunikasi yang erat, diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran COVID-19 yang telah menjadi bencana global dan mencatatkan sejarah pada kehidupan manusia. Faktanya, akibat yang ditimbulkan virus ini, berpengaruh terhadap segala lini kehidupan manusia dan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan COVID-19.

C. Kerangka Fikir

Menurut Richard L. Johannasen terdapat prinsip-prinsip etika komunikasi yang sering dipergunakan oleh orang yang tengah menjalin hubungan komunikasi. Atas dasar pemikiran yang dibangun menggunakan pendekatan teori diatas, maka dapat dibangun kerangka fikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pilar



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip Etika Komunikasi dapat sejalan dengan penerapan Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Prinsip Keindahan. Berdasarkan prinsip ini akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah, menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar dalam mendesign flayer perlu membuat design yang indah dan menarik, kemudian dalam menyampaikan pesan atau konten dengan menggunakan bahasa yang indah diterima oleh masyarakat.
2. Prinsip persamaan. Berdasarkan prinsip ini, akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 melalui postingan harus menggunakan *caption* atau penjelasan postingan dengan tidak membedakan masyarakat dari setiap golongan budaya, ras, dan agama.
3. Prinsip kebaikan. Berdasarkan prinsip ini, akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 melalui postingan harus berkenaan dengan kebaikan masyarakat atau mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

4. Prinsip keadilan . Berdasarkan prinsip ini, akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 melalui postingan, harus memberikan hak atau apa yang seharusnya masyarakat peroleh di masa pandemi, seperti contohnya keterbukaan informasi.
5. Prinsip kebebasan . Berdasarkan prinsip ini, akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 melalui postingan, harus memperhatikan bahwa setiap kebebasan dalam menyampaikan informasi dan membuat kebijakan diikuti dengan tanggung jawab sehingga tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada masyarakat.
6. Prinsip kebenaran. Berdasarkan prinsip ini, akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 melalui postingan, harus dapat dibuktikan baik dengan data maupun dengan tindakan nyata di lapangan, agar kebenaran itu dapat diyakini oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan setelah seminar proposal. Dan lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian di di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah karena lembaga tersebut adalah lembaga yang mempunyai tugas mengelola informasi dan komunikasi publik pemerintah Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka tetapi data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian Kualitatif ini adalah fenomena secara terperinci, mendalam dan lengkap tentang Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk menggambarkan subjek penelitian dengan carayang akurat. Lebih sederhananya, penelitian deskriptif adalah semua

Tabel 2.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan Informan
1.	Mahyuddin,S.STP.,M.A.P	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar
2.	Ade Ismar Gobel, S.STP.M.Si	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
3.	YM	Akademisi
4	NS	Masyarakat Pengguna Media Sosial
5	AR	Masyarakat Pengguna Media Sosial

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan

secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data-data atas keadaan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan beberapa alat pengumpul data seperti melakukan pencatatan yang dianggap penting maupun menggunakan beberapa alat pengumpul data seperti alat perekam suara agar dapat menyimpan percakapan saat melakukan komunikasi dengan responden.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pemahaman dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19.

2. Wawancara

Menurut Burhan yang dimaksud dengan teknik wawancara adalah sebagai berikut ini: Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber penelitian. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara mendalam dan terstruktur. Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Moleong mengemukakan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah sebagai berikut: "Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan dokumen". Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan software Nvivo12 Plus, yaitu dengan menganalisis dan menggambarkan Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Data penelitian yang telah dikumpulkan melalui analisis isi komentar pada postingan terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar pada akun Instagram @dpramdhanpomanto diproses melalui Nvivo, data tersebut kemudian dicocokkan dengan indikator penelitian yang telah ditentukan. Proses pengkodean disesuaikan dengan teori yang telah digunakan. Mengklasifikasikan data sebagai proses retranslasi pengkodean

data, mengklasifikasikan proses pengklasifikasian menggunakan crosstabulation Nvivo, crosstabulation sebagai proses perbandingan setiap data. Tahap terakhir dalam proses analisis nvivo adalah tampilan data dalam bentuk grafik dan tabel, model analisis di Nvivo ini disebut sebagai analisis lima langkah (Woolf & Silver, 2017). Menurut Creswell (2016) biasanya dalam penelitian kualitatif yang digunakan pada umumnya prosedur dari umum kepada langkah-langkah yang khusus. Walaupun analisis ini tergantung dengan jenis strategi yang dipakai, tetapi idealnya adalah mencampurkan dengan prosedur yang umum ke langkah-langkah yang khusus. Dalam proses analisis sebuah data yang menggunakan metode penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan saat sedang berlangsung pengumpulan data, kemudian selesai proses pengumpulan data pada periode tertentu dan wawancara, selanjutnya peneliti telah melakukan analisis dengan jawaban yang diwawancarai. Menurut Miles & Huberman (2007) dalam aktivitas analisis data yang menggunakan metode kualitatif itu dilakukan dengan cara interaktif juga berlangsung terus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, and *conclusion drawing verification*.

Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan menurut Gunawan (2013), yang terdiri dari :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan seleksi, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam deskripsi atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan upaya untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam membuat kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, bagan, tabel, grafik sejenisnya. Beberapa indikator dalam penelitian ini akan disajikan data hasil analisis dari *Software Nvivo12Plus*. Melalui penyaji data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan dengan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, dan akhirnya setelah data dikumpulkan akan diperoleh kesimpulan. Kesimpulan ini kemudian akan diverifikasi untuk diuji validitas dan kebenaran data.

G. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Gambar 2.2

PETA KOTA WILAYAH MAKASSAR



Sumber: makassarkota.go.id

2. Gambaran Umum Tentang Instagram

Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video dimana user (sebutan bagi pengguna instagram) dapat berbagi berbagai macam foto dan video untuk diunggah. Instagram berasal dari dua kata, Insta dan Gram. Insta dari kata “instan”, yaitu sebutan lain dari kamera polaroid. Sedangkan “Gram” bermula dari kata “telegram”. Instagram mengadopsi cara kerja cepat yang dimiliki telegram dalam mengirim informasi, sehingga dapat meng-upload foto dan membagikannya ke masyarakat umum melalui internet yang menyediakan informasi secara cepat.

Instagram juga adalah media sosial yang setiap postingannya berupa foto dan video yang dimana setiap postingan tersebut diberi caption sebagai penjelas dari foto dan video yang dibagikan. Penggunaan caption tak lepas dari penggunaan hastag dikarenakan hal tersebut bertujuan agar postingan tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Fungsi dan kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi foto dan video saja. Instagram juga memperlihatkan jumlah orang yang mengikuto akun dan juga jumlah orang yang kita ikuti, hal ini tentu mempermudah pengguna Instagram untuk mengetahui jumlah pengikut dan bisa mengikuti akun lain sampai tak terhingga jumlahnya.

3. Gambaran Umum Instagram Mohammad Ramdhan Pomanto

Akun Instagram milik Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa dengan panggilan Danny Pomanto yang merupakan Walikota Makassar periode 2021-2024 dan merupakan seorang akademisi serta

politisi asal Gorontalo ini sudah mulai aktif sejak 30 September 2015 dengan nama aku *@dpramdhanpomanto*. Akun ini telah diisi dengan 3.120 postingan yang terdiri dari foto dan video dan memiliki 63 ribu pengikut (*followers*).

Sejak dilantik menjadi walikota pada 26 Februari 2021, Danny Pomanto sudah mulai aktif menjelaskan melalui akun instagram bahwa fokus kerja pada kepemimpinannya ialah penanganan covid-19 dan mulai membedah program penanganan pandemi. Salah satu langkah yang dilakukan Danny adalah meneruskan program pemerintah pusat: vaksinasi Covid-19, yang ditargetkan menjangkau lebih 1 juta populasi warga Makassar. Selain itu, Danny pun meluncurkan program Makassar Recover yang terdiri dari tiga kegiatan besar yaitu imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Dalam Makassar Recover, terdapat tiga satgas dibentuk dan langsung bekerja. Pertama, Satgas Detektor yang bertugas merekam seluruh kesehatan termasuk mengambil data masyarakat dari rumah ke rumah, untuk melihat status kesehatan masyarakat. Kedua, Satgas Raika yang bertugas sebagai Satgas Pengurai Kerumunan. Satgas ini menindak tegas pelaku-pelaku usaha yang membuat orang-orang berkerumun dan menegakkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Ketiga, Satgas Covid-19 Hunter. Satgas ini bertugas melakukan tracing jika dicurigai ada orang yang terjangkit Covid-

B.HASIL PENELITIAN

1. Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial

Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar

Pemerintah didorong untuk melakukan berbagai inovasi terkait pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, apalagi dimasa pandemi ini demi memutus rantai penyebaran virus beberapa aktivitas dan interaksi dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Dalam hal penanganan covid-19 upaya pemerintah menekan laju penyebaran covid-19 juga disampaikan secara virtual melalui media sosial. Sebagai bagian paradigma baru komunikasi pemerintah, komunikator pemerintah kini berpartisipasi mewujudkan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan memberikan saluran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan kolaborasi khususnya dalam penanganan covid-19.

Dalam melaksanakan komunikasi, pemerintah sebagai komunikator informasi publik, dalam penggunaan etika haruslah berhati-hati karena bukanlah tidak mungkin pemahaman etika kita berbeda dengan orang lain. Kurangnya pemahaman antarpemerintah dan masyarakat dapat memunculkan *miss communication* atau bahkan menimbulkan suatu permasalahan dalam penanganan covid-19 dan berujung timbulnya berbagai macam persepsi yang berbeda yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar. Dalam berbagai perbedaan tersebut, kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Nilai-nilai yang membentuk etika harus dipahami dengan benar karena

sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak menggunakan nilai-nilai etika didalamnya, setiap bentuk komunikasi selalu menggunakan etika walaupun dalam kadarnya masing-masing sesuai konteks, tujuan dan situasi yang ada. Maka dari itu etika komunikasi itu sangatlah penting.

Adapun prinsip etika komunikasi yang harus diperhatikan menurut Richard L. Johannes (2019), yang dioperasionalkan dalam penelitian ini yaitu Prinsip Keindahan, Prinsip Persamaan, Prinsip Kebaikan, Prinsip Kebebasan, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Kebenaran.



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Dari analisis hasil wawancara dengan menggunakan fitur *Crosstab Query* melalui Nvivo 12 plus, ditemukan bahwa Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar, indikator Prinsip Kebaikan merupakan indikator yang paling tinggi persentasinya yaitu 28%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah menyampaikan informasi publik melalui akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai salah satu pusat

infomasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih mengutamakan dalam menerapkan prinsip kebaikan. Data tersebut relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar:

“Diskominfo sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai pengelola informasi publik melihat bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial Instagram @dpramdhanpomanto selalu mengutamakan prinsip kebaikan kepada masyarakat dimasa pandemi atau covid-19. Dimana dalam menerapkan prinsip ini, dapat dilihat bahwa dalam postingan terkait program-program pemerintah dalam menangani covid-19 selalu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan atau kebaikan masyarakat agar dapat memutus penyebaran covid-19 di Kota Makassar.”
(Wawancara dengan Mahyuddin, S.STP.M.A.P, 29 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengelola informasi publik, melihat postingan pada akun Instagram @dpramdhanpomanto terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih mengutamakan prinsip kebaikan kepada masyarakat dimasa pandemi seperti merancang program-program penanganan covid, mensosialisasikan sampai dengan peingplementasian program tersebut adalah salah satu upaya pemerintah memutus penyebaran covid-19 di Kota Makassar.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik :

”Melihat instagram menjadi salah satu media sosial yang digemari masyarakat, menjadikan segala aktivitas komunikasi dan penyampaian informasi menjadi efektif ketika disampaikan dalam ruang media sosial khususnya instagram. Maka dari itu, langkah pemerintah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dalam menangani covid-19 sudah tepat. Program-program tersebut dirancang sebagai usaha yang dilakukan pemerintah demi kebaikan masyarakat dimasa pandemi.”
(Wawancara dengan Ade Ismar Gobel, S.STP.M.Si, 29 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan wawancara bersama Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang membahas terkait prinsip keindahan yang diterapkan pada akun instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid di Kota Makassar. Sedangkan, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berfokus membahas instagram sebagai salah satu media sosial yang digemari masyarakat, menjadikan segala aktivitas komunikasi dan penyampaian informasi menjadi efektif ketika disampaikan dalam ruang media sosial khususnya instagram.

Kemudian hasil wawancara dengan Masyarakat Pengguna Media Sosial mengatakan bahwa:

“Akun instagram walikota menjadi salah satu akun yang paling dicari oleh masyarakat tentang bagaimana penanganan covid-19 di Kota Makassar, melihat postingan pada akun tersebut terlihat bahwa penerapan prinsip kebaikan belum dapat dikatakan telah diterapkan secara baik, karena masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan cara-cara pemerintah dalam menanggapi covid-19 di Kota Makassar”

Dari hasil wawancara diatas sejalan dengan wawancara bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang membahas tentang media sosial instagram. Tetapi berbeda dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang membahas terkait penerapan prinsip keindahan, wawancara dengan masyarakat pengguna media sosial mengatakan bahwa penerapan prinsip kebaikan belum diterapkan dengan baik, sebab masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan cara-cara pemerintah dalam menangani covid-19 di Kota Makassar .

Pada item selanjutnya, terdapat indikator Prinsip Kebebasan yang mendapatkan 22% *coding reference percentage*, hal ini menunjukkan bahwa selain prinsip kebaikan, akun media sosial Instagram @dpramdhanpomanto juga menerapkan prinsip kebebasan dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa:

“Dalam penggunaan media sosial Instagram dalam menyampaikan informasi publik, pemerintah mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, melihat postingan pada akun Instagram @dpramdhanpomanto penyampaian informasi terkait penanganan covid-19 dilakukan dengan kebebasan ilmiah tetapi tetap diikuti oleh tanggung jawab.” (Wawancara dengan Mahyuddin, S.STP., M.A.P., 29 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa dalam menggunakan media sosial pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melihat postingan pada akun Instagram @dpramdhanpomanto terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar dilakukan dengan kebebasan ilmiah tetapi tetap diikuti oleh tanggung jawab.

Kemudian hasil wawancara bersama dengan akademisi, menyatakan bahwa :

“Dari segi kebebasan pemerintah Kota Makassar tidak bebas atau transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Buktinya cukup banyak masyarakat yang belum paham tentang covid, contoh lain banyaknya masyarakat yang mengambil paksa keluarganya yang terinfeksi covid-19. Itu semua karena pesan yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya melebar sehingga menyebabkan masyarakat kurang paham akan wabah covid-19 .” (Wawancara dengan Dr. Yahya Mustafa, 8 April 2022)

Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang membahas keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan, Hasil wawancara bersama dengan akademisi mengatakan bahwa pemerintah tidak bebas atau transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Buktinya cukup banyak masyarakat yang belum paham tentang covid.

Indikator selanjutnya Prinsip keadilan juga menjadi bagian penting dengan presentase 14% *coding reference percentage*. Hal ini menandakan adanya sikap pemerintah untuk memberikan kepada masyarakat apa yang semestinya mereka peroleh dimasa pandemi atau covid-19. Program-program penanganan covid-19 yang dirancang oleh pemerintah selalu dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat di masa pandemi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Dalam postingan terkait sosialisasi dan pengimplementasian program-program penanganan covid-19 melalui akun instagram @dprammdhanpomanto sudah menerapkan prinsip keadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam beberapa postingan akun instagram @dprammdhanpomanto menjelaskan solusi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal penanganan covid-19. Informasi yang diberikan secara terbuka ini juga termasuk pada apa yang harus diperoleh masyarakat di tengah-tengah pandemi covid-19." (Wawancara dengan Mahyuddin,S.STP.,M.A.P, 29 Maret 202)

Dari hasil wawancara diatas bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membahas terkait penerapan prinsip keadilan yang dapat dilihat melalui sosialisasi dan pengimplementasian program penanganan covid-19 yang menjadi hak untuk masyarakat peroleh di masa pandemi. Kemudian dalam beberapa

postingan akun instagram @dprammdhanpomanto sebagai pemerintah menjelaskan solusi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal penanganan covid-19

Kemudian hasil wawancara dengan akademisi yang mengatakan bahwa :

“Dalam postingan pada akun instagram Danny Pomanto sering memposting terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Keadilan dalam hal ini menjadi problem karena menimbulkan banyak sentimen negatif, sebab masyarakat dilarang keluar rumah tetapi tidak disiapkan kebutuhan pokoknya dalam rentan waktu lama.” (Wawancara dengan Dr. Yahya Mustafa, 8 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang membahas terkait penerapan prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan solusi penanganan covid-19 melalui postingan akun Instagram @dprammdhanpomanto. Sedangkan, Hasil wawancara bersama akademisi mengatakan bahwa penerapan prinsip keadilan banyak menimbulkan problem dan sentimen negatif.

Indikator dengan presentasi tertinggi keempat adalah Prinsip Kebenaran dengan *coding reference percentage* sebesar 13%, indikator ini juga menjadi bagian penting dalam penerapan etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar, karena prinsip ini merupakan hal yang paling sering dipertanyakan oleh masyarakat melalui kolom komentar. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik :

“Penerapan prinsip kebenaran ini sangat penting diterapkan dalam pengimplementasian penggunaan media sosial oleh pemerintah, karena masyarakat harus diberikan informasi secara jelas dan terbuka, demi menghindari rasa kekecewaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di Kota Makassar .” (Wawancara dengan Ade Ismar Gobel, S.STP.M.Si, 29 Maret 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mengatakan bahwa penerapan prinsip kebenaran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam pengimplementasian penggunaan media sosial oleh pemerintah, karena masyarakat harus diberikan informasi secara jelas dan terbuka, demi menghindari rasa kekecewaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Kemudian Hasil wawancara dengan Masyarakat pengguna media sosial mengatakan bahwa:

“Walaupun pada postingan instagram Danny pomanto sudah memberikan informasi dengan data tentang penanganan covid-19 .Kita juga perlu melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terkadang masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di media sosial. (Wawancara dengan AR, 9 April 2022)

Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan wawancara bersama Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang membahas tentang penerapan prinsip kebenaran sebagai suatu hal yang penting untuk diterapkan demi menghindari rasa kekecewaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di Kota Makassar. Sedangkan, wawancara bersama masyarakat pengguna media sosial mengatakan bahwa data yang disampaikan melalui postingan pada akun Instagram @dpramdhanpomanto terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar juga harus dilihat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Indikator dengan presentasi tertinggi kelima adalah Prinsip Persamaan dengan *coding reference percentage* sebesar 11%, indikator ini juga menjadi bagian penting dalam penerapan etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar, karena pada prinsip ini komunikasi tidak dapat berjalan secara efektif ketika didasari oleh tindakan tindakan diskriminatif.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyatakan bahwa:

“Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi tanpa memandang suku,ras,budaya,dan agama. Hal ini dapat dilihat pada postingan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto tidak pernah menyebutkan secara spesifik kepada siapa informasi tersebut ditujukan. Informasi yang disampaikan selalu berupa himbauan kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar” (Wawancara dengan Mahyuddin,S.STP.,M.A.P, 29 Maret 2022)

Dari hasil wawancara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melihat bahwa pada akun Instagram @dpramdhanpomanto tidak pernah menyebutkan secara spesifik kepada siapa informasi tersebut ditujukan. Informasi yang disampaikan selalu berupa himbauan kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar, artinya informasi yang diberikan tidak dibeda-bedakan karena setiap golongan masyarakat berhak mendapat informasi yang sama.

Kemudian hasil wawancara bersama dengan akademisi mengatakan bahwa:

“Dalam menyampaikan informasi di media sosial terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar sudah standar atau umum tidak ada yang menggunakan narasi yang mendiskriminasi”. (Wawancara dengan Dr.Yahya Mustafa,8 April 2022)

Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi tanpa memandang suku,ras,budaya,dan agama. Sedangkan, hasil wawancara bersama dengan akademisi mengatakan bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar sudah standar atau umum tidak ada yang menggunakan narasi yang mendiskriminasi.

Indikator terakhir yaitu Prinsip Keindahan dengan *coding reference percentage* 9%, meskipun mendapat persentase paling sedikit namun indikator ini tetap menjadi bagian penting dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar, karena Prinsip Keindahan tetap harus diimplementasikan agar masyarakat tertarik untuk membaca dan menaritahu informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar:

“Dalam menyampaikan informasi publik berupa konten maupun flayer harus memperhatikan unsur keindahan agar masyarakat tertarik untuk melihat informasi yang disampaikan ” (Wawancara dengan Mahyuddin,S.STP.,M.A.P, 29 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas, postingan pada akun Instagram @dpramdhanpomanto terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar menerapkan prinsip keindahan dengan memperhatikan unsur keindahan agar masyarakat tertarik untuk mengetahui informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna media sosial, mengatakan bahwa :

“ Postingan yang berbentuk flayer seharusnya diberikan kata kata yang mudah dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat, dalam bentuk konten video alangkah lebih baik jika menyapa masyarakat dengan tutur bahasa yang indah ”. (Wawancara dengan NS, 8 April 2022)

Dari hasil wawancara diatas, sejalan dengan wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar yang mengatakan bahwa dalam menyampaikan informasi melalui postingan pada akun Instagram @dpramdhanpomanto terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar perlu menerapkan prinsip keindahan dengan memperhatikan unsur keindahan agar masyarakat tertarik untuk mengetahui informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar. Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna media sosial juga mengatakan bahwa postingan yang berbentuk flayer seharusnya diberikan kata kata yang mudah dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat, dalam bentuk konten video alangkah lebih baik jika menyapa masyarakat dengan tutur bahasa yang indah.

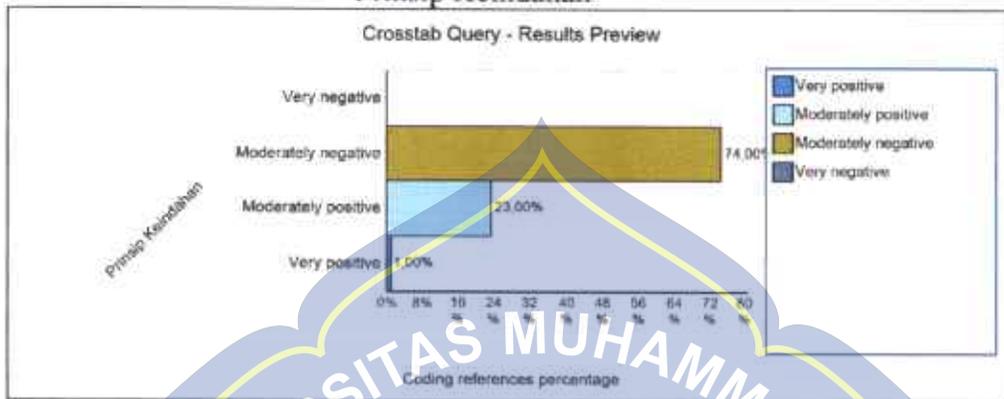
Dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator prinsip kebaikan sebagai indikator yang paling utama dalam penarapan Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar telah diimplementasikan secara efektif . Indikator prinsip kebebasan, prinsip keadilan, dan kebenaran merupakan prinsip yang penting diterapkan dalam Pengimplementasian Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar. Kemudian prinsip persamaan dan prinsip keindahan merupakan

indikator pendukung yang juga telah diimplementasikan dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Prinsip Keindahan

Prinsip Keindahan adalah landasan perilaku pemerintah dalam menyampaikan informasi dengan didasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah memerhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampilkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Prinsip keindahan yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan terkait penanganan covid-19 yang dengan membuat konten penanganan covid berupa flayer yang didesign dengan indah dan menarik untuk masyarakat ketahui. Kemudian pemerintah dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan terkait penanganan covid-19 membuat konten video dengan menggunakan tata bahasa yang indah dan mudah dipahami oleh setiap kalangan masyarakat.

Grafik 4.2
Prinsip Keindahan



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa, Indikator Prinsip Keindahan dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 74% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 23%. Prinsip keindahan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto tidak mendapatkan komentar very negative tetapi mendapatkan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 1%.

Prinsip keindahan lebih kepada tata cara penyampaian informasi publik dengan mengutamakan unsur-unsur keindahan pada pengimplementasian program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar, ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, hasil wawancara sebagai berikut:

“Respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah tergantung dari bagaimana cara pemerintah menyampaikan informasi tersebut, jika cara menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang baik, maka masyarakat tentu akan menerimanya dengan baik”. (Ade Ismar Gobel, S.STP.M.Si, 29 Maret 2022)

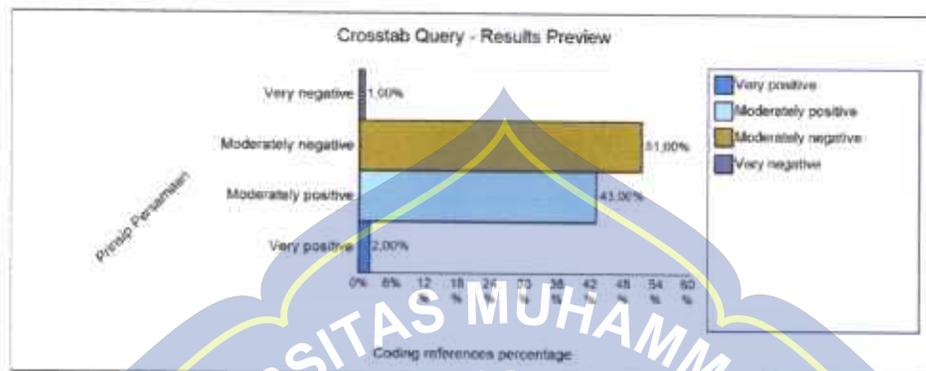
Dari hasil analisis data dan wawancara diatas menunjukkan akun Instagram @dpramdhanpomanto telah menerapkan prinsip keindahan dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar dengan cara memperhatikan unsur-unsur keindahan dalam penyampaian informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keindahan, dimana dalam prinsip keindahan tersebut pemerintah harus memperhatikan segala unsur keindahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui postingan Instagram @dpramdhanpomanto terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Prinsip Persamaan

Prinsip Persamaan adalah landasan dalam perilaku pemerintah untuk tidak membeda-bedakan, karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun, maka dari itu pemerintah dalam memberikan informasi publik terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar harus memberikan informasi tanpa melihat suku, bangsa, ras, budaya, maupun agama. Prinsip persamaan yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan terkait penanganan covid-19 yang tidak memakaikata-kata yang menimbulkan perbedaan pada masyarakat di tengah-tengah pandemi.

Grafik 4.3
Prinsip Persamaan



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa, Indikator Prinsip Persamaan dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 51% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 43%. Prinsip persamaan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 1% dan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 2% .

Prinsip persamaan lebih kepada tata cara penyampaian informasi publik dengan tidak menggunakan bahasa dan tindakan yang diskriminatif dan pada pengimplementasian program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar tidak membedakan latar belakang masyarakat, ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, hasil wawancara sebagai berikut:

“Respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah tergantung dari bagaimana cara pemerintah menyampaikan informasi tersebut”. (Ade Ismar Gobel, S.STP.M.Si, 29 Maret 2022)

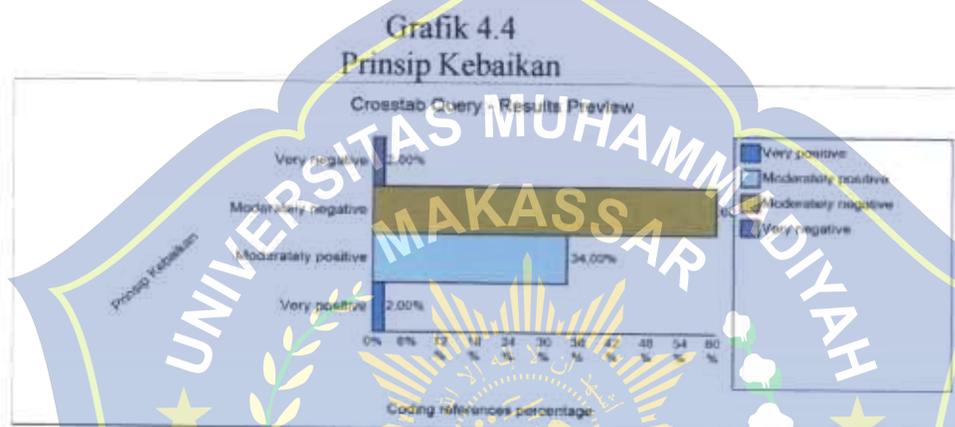
Dari hasil analisis data dan wawancara diatas menunjukkan akun Instagram @dpramdhanpomanto telah menerapkan prinsip persamaan dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar dengan cara memperhatikan penggunaan bahasa dan tindakan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip persamaan, dimana dalam prinsip persamaan tersebut pemerintah harus memperhatikan segala bahasa dan tindakan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat melalui postingan Instagram @dpramdhanpomanto terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Prinsip Kebaikan

Prinsip Kebaikan yaitu landasan dalam penyampaian informasi tentang segala tindakan pemerintah mulai dari pembuatan kebijakan, mensosialisasikan program penanganan covid-19 sampai dengan pengimplementasian program yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan hal-hal yang menguntungkan masyarakat di masa pandemi. Penerapan prinsip ini menciptakan persepsi rasa aman nyaman masyarakat terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat atau warga negaranya. Prinsip kebaikan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari aktivitas dalam pembuatan

kebijakan dan program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar yang diposting dalam bentuk gambar dan penjelasan aktivitas tersebut berupa caption untuk menjelaskan kepada masyarakat langkah yang diambil pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar.



Sumber : diolah oleh peneliti, 2022

Indikator Prinsip Kebaikan dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 60% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 34%. Prinsip Kebaikan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan *coding reference percentage* 2% yang seimbang antara komentar *very positive* dan *very negative*.

Prinsip Kebaikan lebih cenderung kepada aktivitas pemerintah dalam sosialisasi program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar, ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, hasil wawancara sebagai berikut:

“Program-program penanganan covid-19 yang dirancang oleh pemerintah perlu diketahui oleh masyarakat agar kebermanfaatannya dapat diketahui bersama pemerintah memang lebih sering mengkampanyekan program tersebut melalui instagram agar dengan mudah diakses oleh masyarakat.” (Wawancara dengan Mahyuddin,S.STP.,M.A.P, 29 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna media sosial juga mengatakan bahwa :

Dari awal kemunculan covid-19 selalu menimbulkan berbagai persepsi di tengah tengah masyarakat. Dari segi kebaikan memang pemerintah fokus pada tindakan penanganan covid-19 di Kota Makassar, tetapi di sisi lain pemerintah kurang dalam memberikan edukasi dan memperkuat sosialisasi tentang covid sehingga masyarakat tidak menerima dengan baik. (Wawancara dengan NS, 9 Maret 2022)

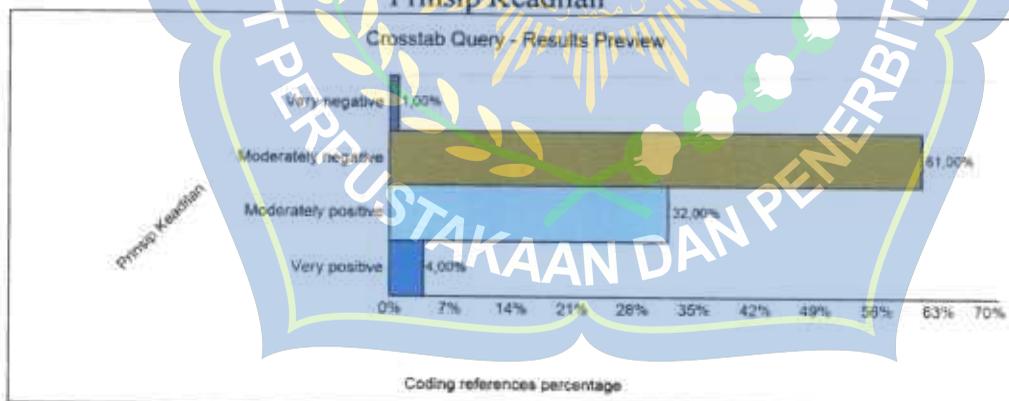
Dari hasil analisis data dan wawancara diatas menunjukkan akun Instagram @dpramdhanpomanto memang sudah menerapkan prinsip kebaikan dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar, tetapi dalam penerapannya kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator Prinsip Kebaikan sudah diterapkan tapi belum memberi kepuasan kepada masyarakat, dimana dalam penyampaian informasi tentang segala tindakan pemerintah mulai dari pembuatan kebijakan, mensosialisasikan program penanganan covid-19 sampai dengan pengimplementasian program yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan hal-hal yang menguntungkan masyarakat di masa pandemi masih belum dapat memberikan respon positif dikarenakan kurangnya edukasi atau sosialisasi pada masyarakat.

Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan adalah landasan dalam perilaku pemerintah untuk memberikan apa yang seharusnya diperoleh masyarakat. Penerapan prinsip ini, berarti pemerintah harus memberikan apa yang menjadi hak masyarakat, dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar hal yang harus diperoleh masyarakat adalah keterbukaan informasi dan solusi penanganan covid-19 yang efektif. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan berupa keterbukaan informasi terkait program-program penanganan covid-19 dan implementasi kegiatan tersebut kepada masyarakat di Kota Makassar.

Grafik 4.5
Prinsip Keadilan



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa, Indikator Prinsip Keadilan dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 61% dibanding dengan komentar

moderately positive dengan *coding reference percentage* 32%. Prinsip Keadilan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 1% dan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 4 %

Prinsip Keadilan lebih kepada keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah dalam ruang media sosial Instagram terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar, ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Informatika dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk keterbukaan informasi pemerintah pasti mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan atau terbuka.” (Wawancara dengan Mahyuddin, S.STP.,M.Si, 29 Maret 2022)

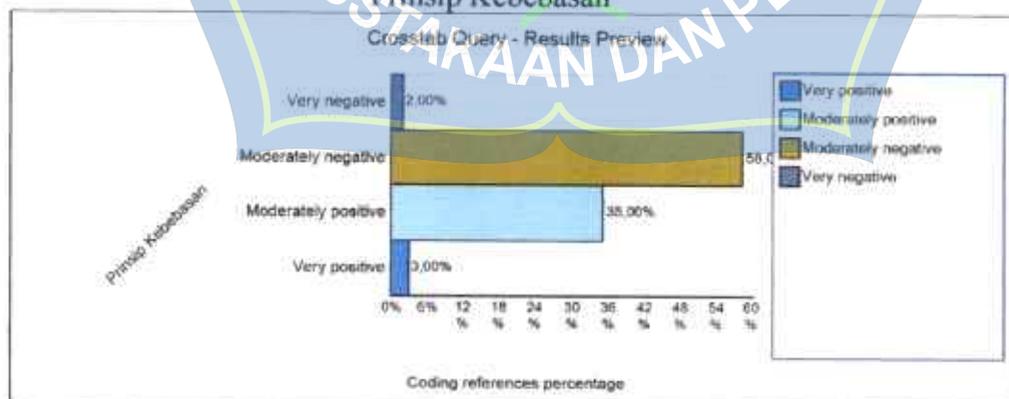
Dari hasil analisis data dan wawancara diatas menunjukkan akun Instagram @dpramdhanpomanto menerapkan prinsip keadilan dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar dengan cara memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan, dimana dalam prinsip keadilan tersebut pemerintah memberikan apa semestinya diperoleh masyarakat khususnya di masa pandemi ini, masyarakat sangat memerlukan keterbukaan informasi terkait tindakan atau solusi apa yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menanganani covid-19 di Kota Makassar.

Prinsip Kebebasan

Prinsip Kebebasan yaitu landasan untuk bebas untuk membuat kebijakan dan mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah. Penerapan prinsip ini, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindakan itu haruslah dipertanggungjawabkan. Artinya meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan suatu tindakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat, pemerintah harus berani bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Prinsip kebebasan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat pemerintah contohnya kebijakan PPKM sebagai salah satu langkah cepat yang harus diambil pemerintah dalam rangka penanganan covid-19 di Kota Makassar tanpa melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Grafik 4.6
Prinsip Kebebasan



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa, Indikator Prinsip Kebebasan dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan

covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 58% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 35%. Prinsip Kebebasan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 2% dan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 3%.

Prinsip Kebebasan lebih cenderung kepada aktivitas pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar, ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, hasil wawancara sebagai berikut:

“Kebebasan pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang gerak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dengan mudah mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui kebebasan bertindak. Tetapi kebebasan tersebut harus diikuti oleh tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat” (Wawancara dengan Ade Ismar Gobel, S.STP.M.Si, 29 Maret 2022)

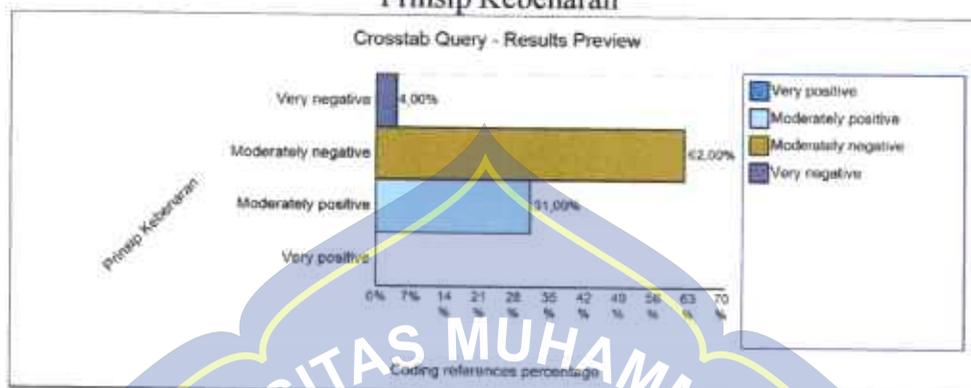
Dari hasil analisis data dan wawancara diatas menunjukkan akun Instagram @dpramdhanpomanto menerapkan prinsip kebebasan dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar, untuk membuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan covid-19 di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator Prinsip Kebebasan, pemerintah menerapkan prinsip kebebasan, dimana dalam prinsip kebebasan tersebut pemerintah berhak mengambil keputusan dan tindakan pemerintah mulai dari pembuatan kebijakan, mensosialisasikan program penanganan covid-19 sampai dengan pengimplementasian program yang dimaksudkan untuk mengatasi persoalan covid-19 di Kota Makassar.

Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran adalah landasan dalam perilaku pemerintah untuk memberikan informasi publik dalam ruang media sosial khususnya Instagram terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar yang sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Penerapan prinsip ini, berarti pemerintah harus memberikan informasi secara jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya, dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar pemerintah harus memperlihatkan tindakan nyata pengimplementasian program penanganan covid-19 oleh pemerintah agar kebenaran tersebut dapat diyakini oleh masyarakat. Prinsip kebenaran yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan pengimplementasian program program penanganan covid-19 yang awalnya disosialisasikan kemudian telah diimplementasikan.

Grafik 4.7
Prinsip Kebenaran



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa Indikator Prinsip Kebenaran dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 62% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 31%. Prinsip Kebenaran dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 4% dan sama sekali tidak ada komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 0% .

Prinsip Kebenaran lebih kepada tindakan nyata pemerintah dalam pengimplementasian program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar, ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, hasil wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat ditengah-tengah pandemi sangat dipahami bahwa mempunyai tingkat kecemasan dalam aktivitas pada masa pandemi, maka dari itu kami bersinergi dengan pemerintah kota untuk merancang program-program penanganan covid-19 tidak hanya dirancang kami membuktikan dengan mengimplementasikan agar program tersebut dapat dilihat sebagai suatu kebenaran bagi masyarakat.” ”.(Wawancara dengan Mahyuddin,S.STP.,M.A.P, 29 Maret 2022)

Dari hasil analisis data dan wawancara diatas menunjukkan akun Instagram @dpramdhanpomanto telah menerapkan prinsip kebenaran dalam etika komunikasi publik pemerintah dalam ruang media sosial terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar dengan cara mengimplementasikan program yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk menangani covid-19 di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip kebenaran, dimana dalam prinsip kebenaran tersebut pemerintah memperlihatkan melalui postingan tindakan nyata dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tindakan nyata tersebut berupa pengimplementasiapan program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penangan Covid-19 di Kota Makassar dengan menggunakan prinsip Richard L. Johannes (2019), yang dioperasionalkan dalam penelitian ini yaitu Prinsip Keindahan, Prinsip Persamaan, Prinsip Kebaikan, Prinsip Kebebasan, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Kebenaran.

Etika Komunikasi adalah bagian penting dalam penyampaian informasi publik dalam ruang media sosial di masa pandemi. Karena cara menyampaikan informasi oleh pemerintah kepada masyarakat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat di masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menerapkan etika komunikasi dengan baik agar masyarakat memercayai segala tindakan pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Prinsip Keindahan

Prinsip Keindahan adalah landasan perilaku pemerintah dalam menyampaikan informasi dengan didasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah memerhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampilkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Prinsip keindahan yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan terkait penanganan covid-19 yang dengan membuat konten penanganan covid berupa flayer yang didesign dengan indah dan menarik untuk masyarakat ketahui. Kemudian pemerintah dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan terkait penanganan covid-19 membuat konten video dengan menggunakan tata bahasa yang indah dan mudah dipahami oleh setiap kalangan masyarakat. Meski terlihat dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keindahan tetapi dalam data hasil analisis nvivo melalui komentar masyarakat pada postingan menunjukkan bahwa, Indikator Prinsip Keindahan dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 74% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 23%. Prinsip keindahan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto tidak mendapatkan komentar *very negative* tetapi mendapatkan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 1%.

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Prinsip Keindahan pada Etika Komunikasi Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar telah diterapkan, dimana pemberian informasi oleh akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah telah menerapkan unsur keindahan pada postingannya. Tetapi dalam penerapannya masih kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penerapan prinsip keindahan memang telah diterapkan oleh pemerintah tetapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat pemerintah tidak hanya sekedar membuat flayer atau poster tentang penanganan covid tetapi pemerintah dalam harapan masyarakat perlu membuat design yang menarik agar masyarakat tertarik untuk melihat dan membaca flayer tentang penanganan covid-19.

Prinsip Persamaan

Prinsip Persamaan adalah landasan dalam perilaku pemerintah untuk tidak membeda-bedakan, karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun, maka dari itu pemerintah dalam memberikan informasi publik terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar harus memberikan informasi tanpa melihat suku, bangsa, ras, budaya, maupun agama. Prinsip persamaan yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan terkait penanganan covid-19 yang tidak memakaikata-kata yang menimbulkan perbedaan pada masyarakat di tengah-tengah pandemi. Meski terlihat dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto bahwa pemerintah

telah menerapkan prinsip persamaan tetapi dalam data hasil analisis nvivo melalui komentar masyarakat pada postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 51% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 43%. Prinsip persamaan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 1% dan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 2% .

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Prinsip Persamaan pada Etika Komunikasi Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar telah diterapkan, dimana pemberian informasi oleh akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai pemerintah tidak ditemukan narasi yang mendiskriminasi masyarakat dalam postingan terkait penanganan covid-19 , tetapi melalui hasil analisis nvivo ditemukan bahwa penerapannya masih kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan hilangnya *respect* masyarakat terhadap cara pemerintah dalam menangani covid, sebab dalam kebijakan PPKM pemerintah melarang beberapa kegiatan yang menimbulkan keramaian. Namun ada momen selebgram Makassar mengadakan pesta ulang tahun yang menimbulkan keramaian dan pemerintah tidak cepat mengambil tindakan, hal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat merasa dibeda-bedakan dan dalam prinsip persamaan ini masih masyarakat belum puas terhadap penerapannya.

Prinsip Kebaikan

Prinsip Kebaikan yaitu landasan dalam penyampaian informasi tentang segala tindakan pemerintah mulai dari pembuatan kebijakan, mensosialisasikan program penanganan covid-19 sampai dengan pengimplementasian program yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan hal-hal yang menguntungkan masyarakat di masa pandemi. Penerapan prinsip ini menciptakan persepsi rasa aman nyaman masyarakat terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat atau warga negaranya. Meski terlihat dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip kebaikan tetapi dalam data hasil analisis nvivo melalui komentar masyarakat Dari analisis hasil wawancara dengan menggunakan fitur *Crosstab Query* melalui Nvivo 12 plus, ditemukan bahwa Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar, indikator Prinsip Kebaikan merupakan indikator yang paling tinggi persentasinya yaitu 28%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah menyampaikan informasi publik melalui akun Instagram @dpramdhanpomanto sebagai salah satu pusat informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih mengutamakan dalam menerapkan prinsip kebaikan.

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Prinsip Kebaikan pada Etika Komunikasi Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar adalah prinsip utama yang

paling sering digunakan dalam postingan pemerintah terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar, dimana pemberian informasi oleh akun Instagram @dpramdhanpomanto telah mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan atau kebermanfaatan bagi masyarakat di masa pandemi. Tetapi melalui hasil analisis nvivo ditemukan bahwa dalam penerapannya masih kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap cara-cara pemerintah dalam menangani covid-19.

Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan adalah landasan dalam perilaku pemerintah untuk memberikan apa yang seharusnya diperoleh masyarakat. Penerapan prinsip ini, berarti pemerintah harus memberikan apa yang menjadi hak masyarakat, dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar hal yang harus diperoleh masyarakat adalah keterbukaan informasi dan solusi penanganan covid-19 yang efektif. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan berupa keterbukaan informasi terkait program-program penanganan covid-19 dan implementasi kegiatan tersebut kepada masyarakat di Kota Makassar. Meski terlihat dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan tetapi dalam data hasil analisis nvivo melalui komentar menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 61% dibanding dengan

komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 32%. Prinsip Keadilan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 1% dan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 4 % .

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Prinsip Keadilan pada Etika Komunikasi Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penanganan covid-19 dan solusi penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tetapi melalui hasil analisis nvivo ditemukan bahwa dalam penerapannya masih kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan jenuhnya masyarakat terkait informasi yang diberikan. Contohnya pada informasi terkait kebijakan PPKM yang membuat masyarakat berkomentar negatif, sebab kebijakan PPKM tersebut dianggap bertele-tele karena dibuat dari level 1-4 . Selain itu munculnya komentar negatif, dikarenakan PPKM terus diperpanjang tetapi kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat belum puas dalam penerapan prinsip keadilan.

Prinsip Kebebasan

Prinsip Kebebasan yaitu landasan untuk bebas untuk membuat kebijakan dan mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah . Penerapan prinsip ini, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindakan itu haruslah dipertanggungjawabkan. Artinya meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan suatu tindakan yang harus

diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat, pemerintah harus berani bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Meski terlihat dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip kebebasan tetapi dalam data hasil analisis nvivo melalui komentar menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 58% dibanding dengan komentar *moderately positive* dengan *coding reference percentage* 35%. Prinsip Kebebasan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 2% dan komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 3 %.

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Prinsip Kebebasan, pemerintah menerapkan prinsip kebebasan, dimana dalam prinsip kebebasan tersebut pemerintah berhak mengambil keputusan dan tindakan pemerintah mulai dari pembuatan kebijakan, mensosialisasikan program penanganan covid-19 sampai dengan pengimplementasian program yang dimaksudkan untuk mengatasi persoalan covid-19 di Kota Makassar. Tetapi melalui hasil analisis nvivo ditemukan bahwa dalam penerapannya masih kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap pemerintah bebas membuat program penanganan covid-19 yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya program detector covid, program

yang banyak di kritik oleh masyarakat karena banyak tenaga kesehatan yang melanggar protokol kesehatan saat menjalankan tugasnya, masyarakat menganggap program ini hanya membuang-buang anggaran dan sebaiknya lebih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemi.

Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran adalah landasan dalam perilaku pemerintah untuk memberikan informasi publik dalam ruang media sosial khususnya Instagram terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar yang sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Penerapan prinsip ini, berarti pemerintah harus memberikan informasi secara jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya, dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar pemerintah harus memperlihatkan tindakan nyata pengimplementasian program penanganan covid-19 oleh pemerintah agar kebenaran tersebut dapat diyakini oleh masyarakat. Prinsip kebenaran yang diterapkan dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto dapat dilihat dari postingan pengimplementasian program penanganan covid-19 yang awalnya disosialisasikan kemudian telah diimplementasikan. Meski terlihat dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip kebenaran tetapi dalam data hasil analisis nvivo melalui komentar menunjukkan bahwa akun Instagram @dpramdhanpomanto dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan komentar *moderately negative* dengan *coding reference percentage* 62% dibanding dengan komentar *moderately positive*

dengan *coding reference percentage* 31%. Prinsip Kebenaran dalam akun Instagram @dpramdhanpomanto juga mendapatkan komentar *very negative* dengan *coding reference percentage* 4% dan sama sekali tidak ada komentar *very positive* dengan *coding reference percentage* 0% .

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip kebenaran, dimana dalam prinsip kebenaran tersebut pemerintah memperlihatkan melalui postingan dengan data dan tindakan nyata dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tindakan nyata tersebut berupa pengimplementasian program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar. Tetapi dalam penerapannya masih ada masyarakat yang belum puas terhadap penerapan prinsip tersebut, hal ini dikarenakan pengimplementasian program-program penanganan covid-19 di Kota Makassar tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat pemerintah tidak hanya sekedar membuat program tetapi betul betul dalam pelaksanaan program tersebut, contohnya program pengadaan kontainer makassar recover sebagai tempat untuk melakukan vaksinasi. Banyak masyarakat yang kecewa, sebab container tersebut hanya berjalan beberapa bulan setelah diresmikan, kemudian beberapa container tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar, penulis menggunakan prinsip Etika Komunikasi yang terdiri dari Prinsip Keindahan, Prinsip Persamaan, Prinsip Kebaikan, Prinsip Keadilan, Prinsip Kebebasan, dan Prinsip Kebenaran dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Keindahan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah diterapkan pada penyampaian informasi terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar . Penerapan prinsip keindahan ini sangat berpengaruh pada respon masyarakat , informasi berupa konten yang mempunyai unsur keindahan akan menarik masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut. Akan tetapi pada prinsip ini, masih ada masyarakat yang belum memahami dan belum puas pada penerapan prinsip keindahan tersebut.
2. Prinsip Persamaan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah diterapkan pada penyampaian informasi terkait dengan penanganan covid-19 di Kota Makassar . Penerapan prinsip persamaan ini juga sangat berpengaruh pada respon masyarakat terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar, informasi harus diberikan tanpa membedakan agama,suku,ras,dan budaya. Karena

belum memahami dan belum puas pada prinsip yang diterapkan tersebut.

5. Prinsip Kebebasan, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto pada dasarnya sering menggunakan prinsip ini, pemerintah memiliki hak untuk bebas melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah. Penerapan prinsip ini bukan berarti pemerintah semena-mena melakukan tindakan, olehnya dalam penerapan prinsip ini tetap diikuti oleh tanggung jawab. Pada prinsip ini, masih ada masyarakat yang belum memahami dan belum puas pada prinsip yang diterapkan tersebut.
6. Prinsip Kebenaran, dalam postingan akun Instagram @dpramdhanpomanto sudah menerapkan prinsip ini, pemerintah menyampaikan informasi publik dengan data melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah dalam menerapkan prinsip ini membuktikan kerja nyata agar kebenaran akan tindakan pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya dalam penanganan covid-19. Pada prinsip ini, masih ada masyarakat yang belum memahami dan belum puas pada prinsip yang diterapkan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki tata cara berkomunikasi atau etika komunikasi Publik dalam ruang media sosial, khususnya instagram yang mudah diakses masyarakat dan memuat segala informasi terkait penanganan covid-19 di Kota Makassar masyarakat mengetahui setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di Kota Makassar, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik serta kepercayaan masyarakat terhadap penanganan covid-19 di Kota Makassar.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap agar penelitian selanjutnya lebih mendalam membahas penerapan Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin Salam. 2000. *Etika Sosial (Asas Moral dalam Kehidupan Manusia)*. Jakarta: PT Rineka Cipta., hlm. 3
- Bungin Burhan. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 108.
- Canel, Maria Jose & Karen Sanders. (2012). *Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research*. The Sage Handbook of Political Communication
- Cangara, Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi (Cetakan Kedua)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Akbar, Syarifuddin. 2021. "Media Komunikasi Dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2(1): 73–82.
- Irhamdi, Muhammad. 2018. "Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial (Facebook)." *Komunike* 10(2): 139–52.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Gunawan, Budiyanto, B. D. A. (2020). *Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi* (Junaedi Fajar (Ed.)). Buku Litera.
- Hariyanto Eri, D. K. J. C. (2019). *Komunikasi Publik di Era Industri 4.0*.
- Hasan, Erlina 2005. *Komunikasi pemerintahan*. Bandung: Rafika aditama.
- Karunianingsih, D. A., & Utomo, A. S.,(2020). *ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK BAGI HUMAS PEMERINTAH DALAM BERMEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PADA AKUN TWITTER @ KEMKOMINFO DAN @ INFOBMKG)*. 8.
- Kasiran. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantatif dan Kualitatif*. Malang: UIN Press, hlm. 15.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Prenada Media Group.
- Mufid, M. (2009). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Akbar, Syarifuddin. 2021. "Media Komunikasi Dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2(1): 73–82.
- Irhamdi, Muhammad. 2018. "Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial (Facebook)." *Komunike* 10(2): 139–52.
- Morissan, Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 44.
- Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h.101
- Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 92-94
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Pelangi Aksara.
- Rahmanita, G. (2021). *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial* (R. Fauzi (Ed.)), Penerbit Insania.
- Richard L. Johannesen, Etika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h.6.
- Rosadi Ruslan. 2008. *Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 31-32
- Sastrosupono, 2001. Supriyadi. *Etika (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Offset Alumni. 2001, hlm. 9
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 92
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm 32
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teddy, D. (2021). *Ilmu Komunikasi* (Bakhri Syamsul (Ed.)). Zahir Publishing.
- Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2021). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021. VII(102)*, 26–36.
- Ulfa, K. S. (2020). *ETIKA KOMUNIKASI PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL*. 8, 17–34.

Qohar, Adnan, H., Drs. 2012. *Jurnal Pengertian Etika dan Profesi Hukum*.

Widiastuti, R. N. (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Widjaja, A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta

Yulistiono Agus. (2021). *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial* (R. Fauzi (Ed.)). Penerbit Insania.



L



A

N



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 - 4671729
E-Mail : diskominfo@makassar.go.id Home Page : <http://makassarkota.go.id>

Makassar, 11 Maret 2022

Kepada

Nomor : 800/7674/DISKOM/III/2022 Yth. Saudara Sitti Nurhaliza Febryna Khaidir
Lampiran :
Perihal : Kesiediaan Menerima di- Makassar
Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 070/842-II/BKBP/III/2022,
Tanggal 8 Maret 2022 Perihal Izin Penelitian oleh :

Nama : **Sitti Nurhaliza Febryna Khaidir**
Jurusan : 105641110518 / Ilmu Pemerintahan
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH Makassar
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAHAN DALAM RUANG MEDIA
SOSIAL TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DI KOTA MAKASSAR"**

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terhitung mulai tanggal
10 Maret sampai dengan 10 Mei 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya
difuatkan terima kasih.



Mahyuddin, S.STP., M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19781224 199711 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop.Sul-Sel di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop.Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

**FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Nama	Siti Nurhaliza Febryna Khaidir
NIM	105641110518
No. HP	087720895242
Email	Febrynabby10@gmail.com
Nama Pembimbing	1. Dr.Hj.Ihyani Malik.,S.Sos.,M.Si 2. Muhammad Randy Akbar.,S.IP.,M.Si
Judul	Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar

Naskah tersebut berisi elemen penulisan berikut ini:

Keterangan (bertanda V)	Ya	Tidak
Judul Naskah jelas		
Nama Mahasiswa (Nama Pertama) diikuti Nama Pembimbing (Nama Terakhir) ditulis tanpa gelar	V	
Nama Jurusan / Program Studi, Fakultas dan Universitas ditulis jelas	V	
Abstrak ada dan di ikuti Kata Kunci	V	
Pendahuluan (latar belakang dan tujuan) ditulis dengan jelas	V	
Isi Makalah (metode, hasil dan pembahasan) ditulis dengan jelas	V	
Kesimpulan ditulis dengan jelas	V	
Daftar Pustaka (hanya ditulis yang ada pada makalah)	V	
Naskah berisi maksimal 15-20 halaman	V	

Pembimbing I



Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Muhammad Randy Akbar,S.IP.,M.Si

Tgl. Persetujuan : 30/04/2022

Tgl. Persetujuan : 30/04/2022

Naskah telah disusun sesuai dengan Layout penulisan artikel sebagaimana tercantum dalam Outlet Artikel Jurnal sehingga L A Y A K dipublikasikan. Mengetahui :

Pengelola Jurnal



Nursaleh Hartaman, S. IP., M.IP

Artikel disetujui Pengelola Jurnal digunakan untuk ujian skripsi, diserahkan lagi ke Pengelola untuk diupload ke jurnal online.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 801503 Fax (0411) 865508

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza Febryna Khaidir
NIM : 105641110518
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 11 Mei 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar



Wawancara Bersama Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Kota Makassar



Wawancara Bersama Akademisi

RIWAYAT HIDUP



Siti Nurhaliza Febryna Khaidir., Lahir di Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Februari 2000. Penulis Merupakan Anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Khaidir A. Hamid dan Ibu Nurlily S.Pd.I. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Sungguminasa pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Centre Mangalli dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMPIT Al-Fityan Gowa, kemudian pindah pada tahun 2014 di MTS Aisyiyah Sungguminasa dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat, Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah di SMK Pratidina Makassar dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul skripsi Etika Komunikasi Publik Pemerintah dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan kepada masyarakat ilmu yang diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.